

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Didalam suatu *doen plegen* terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina*(tangan yang menguasai), dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai). Sesungguhnya orang yang melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*), tetapi yang paling bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh melakukan (*manus domina*) karena dia yang menyebabkan orang lain melakukan tindak pidana. Dalam hal ini *manus ministra* tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh (*manus ministra*) mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (tentang hapusnya pidana karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit), Pasal 48 (tentang hapusnya pidana karena pengaruh daya paksa), Pasal 49 (tentang hapusnya pidana karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas untuk diri sendiri atau orang lain), Pasal 50 (tentang hapusnya pidana karena melaksanakan ketentuan undang-undang) dan Pasal 51 (tentang hapusnya pidana karena untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang) KUH Pidana tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi

atau memberatkan pidana. Sehingga menurut hemat peneliti seorang *manus ministra* tidak dapat dipidana serta tidak bisa dimintai pertanggung jawaban, yang seharusnya bertanggung jawab serta dapat dipidana adalah *manus domina*.

2. Didalam amar putusan hakim pada peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwasannya Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Hendra Saputra dinyatakan bersalah dan melawan hukum sehingga terdakwa dipidana dengan pidana penjara. Ketika didalam amar putusan hakim pada peradilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Jakarta bahwasannya Majelis Hakim memutuskan untuk menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim yang mengadili pada tingkat kasasi dengan perkara Nomor : 980 K/Pid.Sus/2015 yang mana diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar. SH. LLM mengadili Terdakwa dengan amar putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*), memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan, serta membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara.

## **B. Saran**

Pada kasus yang diangkat, semua pertimbangan penuntut umum serta Majelis Hakim pada 2 tingkat peradilan sebelumnya yaitu tingkat pertama dan tingkat banding ditolak serta dinyatakan tidak dapat diterima pada tingkat kasasi. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim sangat mempengaruhi penjatuhan putusan yang diberikan terhadap terdakwa. Hakim harus memiliki ketelitian dan penafsiran yang tinggi. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan dengan pertimbangan seadil-adilnya dan mendengarkan kedua belah pihak. Putusan hakim sangat memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi terdakwa. Sehingga menurut hemat peneliti keadilan yang setinggi-tingginya bukanlah tentang siapa yang seharusnya dihukum atau dipidana akan tetapi keadilan yang setinggi-tingginya itu adalah keadilan yang meletakkan hukuman pada porsinya masing-masing.